

# Komitmen Indonesia Untuk Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Fosil dan Peningkatan Efisiensi Energi di G20<sup>1</sup>

## I. Pendahuluan

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan oleh sejumlah negara dipandang telah mendorong pemborosan dalam konsumsi, mengurangi keamanan energi, menghambat investasi dalam sumber-sumber energi yang ramah lingkungan dan menghambat upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Karena pertimbangan tersebut, dalam KTT G20 di Pittsburgh bulan September 2009 pemimpin-pemimpin G20 bersepakat untuk membatasi dan merasionalisasi subsidi BBM yang tidak efisien dalam jangka menengah dan pada saat yang sama menyediakan bantuan bagi kaum miskin (*to phase out and rationalize over the medium term inefficient fossil fuel subsidies while providing targeted support for the poorest*). Pada KTT selanjutnya di Toronto bulan Juni 2010, di Seoul Nopember 2010 negara-negara mempertegas kembali komitmen tersebut dengan melaporkan kondisi subsidi BBM yang tidak efisien. Pembatasan subsidi juga dilihat sebagai langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*).

Sebagai negara anggota forum G-20, Indonesia bersama-sama dengan negara anggota lainnya berkomitmen untuk merasionalisasi subsidi BBM dan meningkatkan efisiensi energi. Komitmen ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga berkaitan dengan peran Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Komitmen ini ditegaskan Indonesia dalam KTT G-20 tahun 2010 di Seoul, di mana Indonesia berencana untuk menghapus subsidi BBM secara bertahap dan melakukan pengelolaan sisi permintaan.

Dalam penilaian Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto, semua anggota G20 diberikan tanda n/a untuk aspek FFS. Ini untuk mengindikasikan tidak adanya upaya lembaga dalam aspek ini untuk menyepakati terminologi umum dan mengelaborasi mekanisme pelaporan yang transparent dan seragam. Setiap anggota G20 memberikan laporan berdasarkan ukuran masing-masing dan karenanya, menurut kedua tim peneliti tersebut, pemenuhan komitmen ini sulit diukur. Sementara untuk aspek efisiensi energi dalam agenda pembangunan, Indonesia mendapatkan nilai 0 (nol).

Kajian ini akan menyediakan analisis terkait dengan kebijakan Indonesia dalam pembatasan subsidi BBM dan efisiensi energi. Pertama akan dipaparkan kebijakan sektor energi secara umum dan karakteristik sektor energi Indonesia. Kemudian akan dikaji diversifikasi dan konversi energi, dan kebijakan pembatasan subsidi BBM. Kajian selanjutnya akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi terkait dengan pembatasan subsidi BBM dan efisiensi energi yang dapat membantu menjelaskan tingkat kesulitan Indonesia dalam memenuhi komitmen dalam aspek FFS ini.

## II. Kebijakan Sektor Energi Indonesia

Kebijakan energi di Indonesia disusun sejak tahun 1976 ketika pemerintah membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN), lembaga setingkat kementerian, yang diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan energi dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Tahun 1981, BAKOREN mengeluarkan Kebijakan Umum

---

<sup>1</sup>Kajian Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (BKF). Draft awal disusun oleh Siwi Nugraheni, Yulius Purwadi Hermawan dan Rakhmindyarto.

Bidang Energi (KUBE), yang kemudian direvisi pada tahun 1987 dan 1991, dengan fokus pada tiga hal: intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi. Langkah intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan survey dan eksplorasi sumber daya energi untuk mengetahui potensi ekonomisnya. Diversifikasi energi dilakukan dengan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan mengalihkannya pada sumber energi lain (khusus untuk pembangkit listrik dan pabrik semen ditetapkan batubara sebagai sumber energi utamanya). Konservasi energi dicapai dengan cara meningkatkan efisiensi energi.

KUBE selanjutnya yang disusun pada tahun 1998 menambahkan dua hal dalam arah kebijakan energi Indonesia, yaitu: menetapkan harga energi yang secara bertahap diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2003 yang disusun Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, merupakan dokumen kebijakan di bidang energi selanjutnya yang menggantikan KUBE 1998. KEN 2003, yang menjadi dasar UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, memiliki semangat utama yang serupa dengan kebijakan-kebijakan energi sebelumnya. KEN 2003 ini dijabarkan lebih rinci menjadi dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 tahun 2006 tentang *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional 2005 – 2025, dengan sasaran utama kebijakan adalah tercapainya elastisitas energi<sup>2</sup> di bawah satu pada tahun 2025 dan terwujudnya bauran energi primer (*energy mix*) yang didominasi oleh sumber energi non-BBM (70 %) pada tahun 2025, dengan rincian: gas bumi (30%), batubara (33%), bahan bakar nabati (5%), geothermal (5%), batubara cair (2%) dan lainnya (termasuk biomassa, surya, angin, mikrohidro dan nuklir) (5%). Kontribusi BBM sebagai sumber energi yang saat ini sebesar 49,5% (ESDM 2012), diharapkan turun menjadi 33% pada tahun 2025.

Kebijakan energi nasional yang berikutnya adalah UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi. Secara umum tujuan pengelolaan energi di Indonesia menurut UU No. 30 tahun 2007 adalah mencapai kemandirian energi dengan terjaminnya pasokan energi, meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan akses masyarakat terhadap energi (terutama bagi kelompok berpendapatan rendah), dan menjamin kelestarian lingkungan. Menyangkut harga energi, UU No. 30 tahun 2007 menyebutkan bahwa harga energi ditentukan pada nilai keekonomiannya dan subsidi diberikan pada kelompok masyarakat miskin.

Kebijakan sektor energi di Indonesia juga dipengaruhi oleh isu perubahan iklim. Berkaitan dengan langkah mitigasi perubahan iklim, Presiden menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi GRK sebesar 26% dengan pendanaan domestik dan akan ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan dana luar negeri dari skenario *business as usual* (BAU), pada tahun 2020 (ICCSR 2009). Sektor energi merupakan salah satu dari sembilan sektor utama yang menjadi sasaran penurunan GRK. Penurunan GRK dari sektor energi diharapkan menyumbang sekitar 5% dari target penurunan secara total. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sudah disusun, dan menjabarkan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. RAN-GRK sektor energi secara umum meliputi dua hal: mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan energi di Indonesia dari waktu ke waktu memiliki tujuan untuk mencapai ketahanan energi secara mandiri. Dari sisi pasokan, sasaran yang akan dicapai adalah terjaminnya pasokan energi yang dihasilkan dari sumber

---

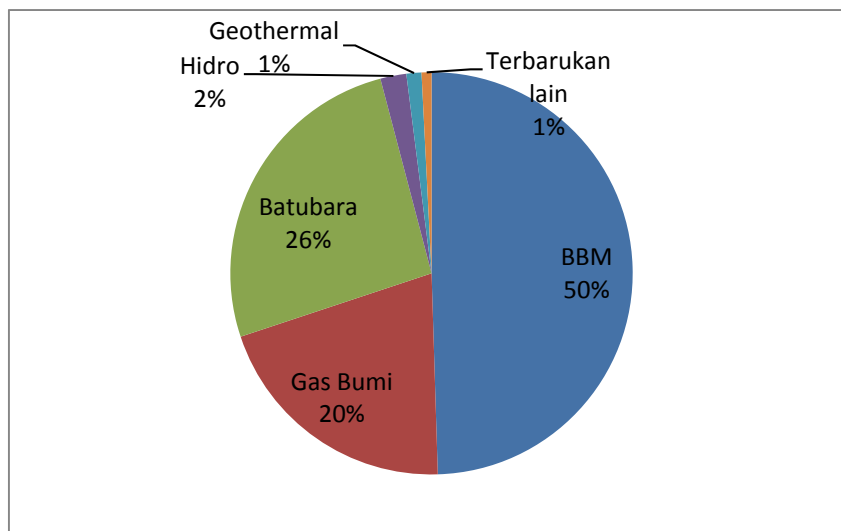
<sup>2</sup> Elastisitas energi adalah salah satu indikator efisiensi energi. Selain elastisitas energi, efisiensi energi dapat diukur dengan intensitas energi. Perbedaan keduanya adalah: elastisitas energi menghitung perbandingan laju pertumbuhan PDB terhadap laju pertumbuhan konsumsi energi, sedangkan intensitas energi adalah perbandingan antara jumlah konsumsi energi per PDB dimana penggunaan energi akan semakin efisien bila angkat intensitasnya semakin rendah.

yang semakin beragam, dengan meningkatkan peran sumber energi non-BBM (langkah diversifikasi energi). Dari sisi permintaan, selain meningkatkan akses masyarakat terhadap energi (terutama bagi kelompok berpendapatan rendah), pengelolaan permintaan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi energi (langkah konservasi energi). Kebijakan yang menyangkut harga energi diarahkan untuk mencapai harga pada tingkat keekonomian produk energi dengan subsidi yang diberikan terbatas pada kelompok masyarakat tidak mampu. Kebijakan energi juga bertujuan untuk mencapai kelestarian lingkungan serta mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan. Tujuan dan sasaran kebijakan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, penetapan harga energi pada tingkat keekonomiannya akan menjamin pemanfaatan energi yang makin efisien, dan dengan demikian akan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Demikian pula halnya dengan langkah diversifikasi energi yang memberi kesempatan pada energi baru dan terbarukan untuk berperan, juga sesuai dengan langkah-langkah konservasi alam.

### III. Diversifikasi dan Konservasi Energi – Kondisi Saat ini

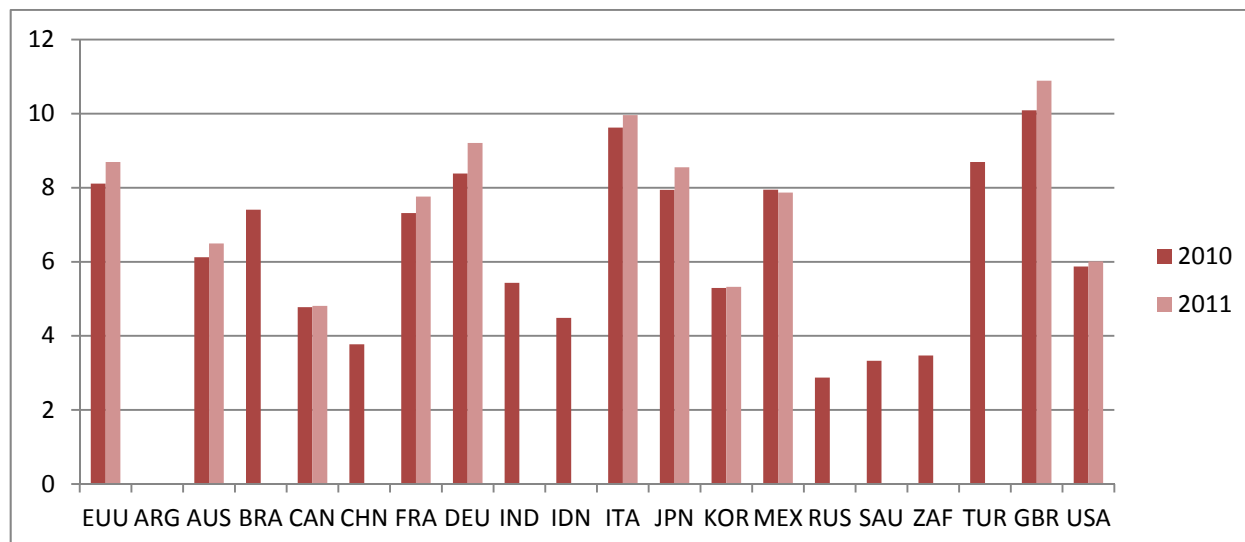
Bauran energi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari sumber energi yang digunakan. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa BBM masih merupakan sumber energi yang utama (49,5%), disusul batubara (26%), gas (20,4%), air (2,1%), panas bumi (1,2%) dan sisanya (0,8%) adalah dari sumber energi terbarukan lainnya (Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM 2012). (Lihat Diagram10.1).

**Diagram 10.1. Sumber Energi di Indonesia, Tahun 2012**



Sumber: Kementerian ESDM 2012

**Grafik 10.1. Produk Domestik Bruto (dalam USD yang Disesuaikan dengan PPP) Negara-negara G20 untuk Setiap Energi Setara 1 Kg Minyak (Tahun 2010 dan 2011)**



Dalam hal efisiensi energi, data dari *International Energy Agency* (IEA) (2013) menyebutkan bahwa intensitas energi di Indonesia pada tahun 2010 yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) dari setiap unit energi adalah sebagai berikut: setiap satu satuan energi yang setara dengan 1 Kg minyak menghasilkan 4,48 USD PDB (catatan: PDB sudah disesuaikan dengan *Purchasing Power Parity*). Dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika dan Inggris, intensitas energi di Indonesia masih tergolong rendah (lihat Grafik 10.1.). Artinya, konsumsi energi di Indonesia lebih boros dibanding negara-negara tersebut. Meskipun demikian Indonesia masih lebih efisien jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti: Rusia, Arab Saudi dan Cina.

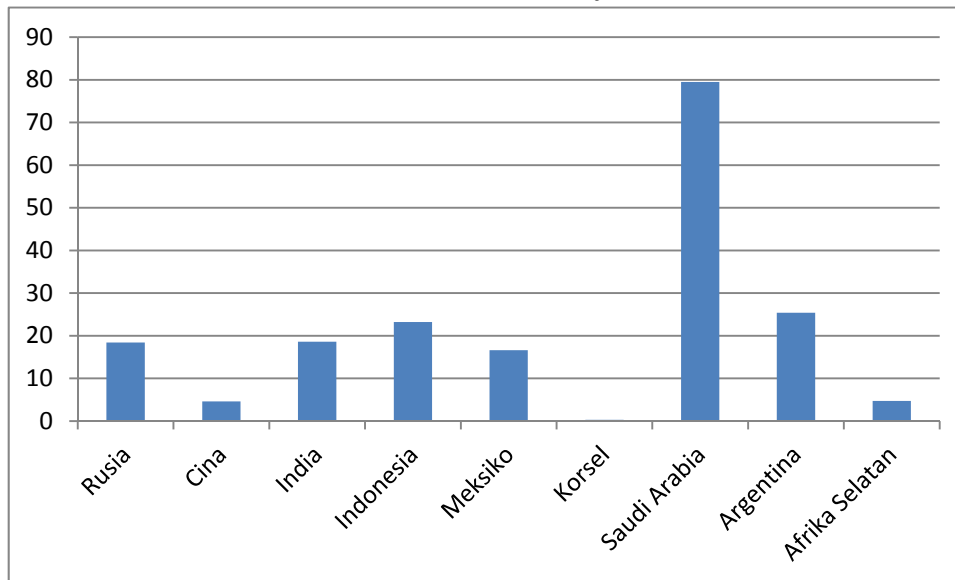
Dari aspek harga, subsidi BBM di Indonesia yang mengambil 17% dari anggaran negara (lihat bagian A.5) menunjukkan bahwa tujuan penetapan harga pada tingkat keekonomiannya belum tercapai. Terlebih lagi, tertundanya pencapaian tujuan ini juga menyebabkan dampak lain, diantaranya: hilangnya insentif bagi pengembangan energi baru dan terbarukan; serta, makin tingginya kejahatan penyelundupan BBM ke luar negeri. Harga BBM bersubsidi menyebabkannya 'lebih murah' dibanding harga produk energi dari sumber energi baru dan terbarukan, dan harga domestik BBM yang disubsidi tersebut juga menjadikannya lebih murah daripada harga energi sejenis di negara lain. Peningkatan efisiensi energi juga akan mendapat tantangan yang makin berat karena adanya subsidi.

Salah satu komitmen yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota G20 adalah penghapusan subsidi BBM. Namun, tidak ada kesepakatan dalam mengukur besaran subsidi ini di antara negara-negara tersebut. IEA mengusulkan sebuah indikator subsidi BBM dengan cara menghitung tingkat subsidi terhadap biaya produksi.

Dalam konteks G20, Indonesia bukan negara yang paling besar dalam memberikan subsidi bahan bakar fosil. Indonesia adalah salah satu dari sembilan negara yang menerapkan subsidi BBM. Diantara sembilan negara tersebut, kinerja Indonesia masih lebih baik dibandingkan Saudi Arabia dan Argentina. Delapan negara lainnya adalah: Afrika Selatan, Arab Saudi, Rusia, Cina, India, Meksiko, Korea Selatan dan Argentina. Dengan

menggunakan ukuran subsidi yang diusulkan oleh IEA, data menunjukkan bahwa pada tahun 2011 tingkat subsidi BBM di sembilan negara tersebut bervariasi, antara 0,3 (Korea Selatan) dan 79,5 (Arab Saudi) (lihat Grafik 10.2) (IEA 2013). Dibandingkan negara-negara lainnya, tingkat subsidi BBM di Indonesia (23,2%) termasuk dalam kategori moderat (IEA 2013).

**Grafik 10.2. Tingkat Subsidi BBM Sembilan Negara Anggota G20  
(% dari Total Biaya Produksi)**



Sumber: IEA (2013)

#### **IV. Kinerja Indonesia dalam Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan Efisiensi Konsumsi Energi**

Penghapusan subsidi BBM sebetulnya telah dicanangkan Indonesia jauh sebelum negara ini bergabung dalam forum G20. Kesadaran tentang keterbatasan cadangan bahan bakar fosil dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya telah mendorong Indonesia untuk membangun kebijakan energi nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi dalam konsumsi energi dan melakukan diversifikasi sumber energi, terutama memberi peran yang makin besar pada sumber energi baru dan terbarukan.

Pemerintah telah membuat kebijakan pengurangan subsidi energi sebagai upaya memperkuat anggaran pemerintah. Sejak Januari 2013, pemerintah memutuskan meningkatkan tarif listrik secara bertahap setiap tiga bulan. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah bagi aktivitas bisnis dan masyarakat yang rentan. Rata-rata naiknya tarif listrik sebesar 15 % setiap tahunnya. Pada tiga bulan pertama, naiknya diputuskan 4,3% dengan variasi kenaikan di antara kelompok-kelompok pelanggan. Perkecualian diberikan kepada kelompok rumah tangga dengan 450-900 Volt Ampere di mana mereka tidak dikenakan kenaikan tarif listrik. Bagi pelanggan dengan daya 6.600 VA atau lebih harus membayar biaya ekonomi bagi konsumsi listriknya. Kebijakan ini diproyeksikan akan menghemat hingga 14,9 trilyun Rupiah atau sekitar 19% pengurangan total subsidi listrik di tahun 2013.

Dalam hal pengurangan subsidi BBM, pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang perlunya penghapusan subsidi BBM dilakukan secara intensif terutama pada saat Widjajono Partowidagdo menjadi Wakil Menteri ESDM (Oktober 2011 – April 2012). Sehingga, pelan

tapi pasti, sebagian masyarakat mulai dapat memahami perlunya menghapus subsidi BBM, karena alasan: secara netto Indonesia adalah negara pengimpor minyak dan subsidi BBM selama ini telah salah sasaran (mayoritas dinikmati oleh para pemilik mobil pribadi, yang merupakan kelompok pendapatan menengah atas).

Keputusan untuk menaikkan harga BBM sebagai upaya untuk menghemat anggaran subsidi negara telah melalui proses politik yang cukup panjang sejak awal tahun 2012. Pada bulan Juni, Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menaikkan harga BBM dan program sosial yang ditujukan untuk mengatasi dampak naiknya harga BBM bagi masyarakat miskin. Harga premium dinaikkan 33 % menjadi 6.500 Rupiah per liter dan harga solar dinaikkan 22 % menjadi 5.500 Rupiah per liter. Persentasi yang lebih kecil bagi solar dikarenakan ini dapat mengatasi inflasi karena bahan bakar ini banyak dipakai oleh truk pengangkut bahan-bahan pokok, transportasi publik dan perahu nelayan. Naiknya harga BBM diperkirakan dapat menghemat anggaran pemerintah hingga 37 triliun Rupiah.

Pemerintah juga melanjutkan kebijakan untuk membatasi penggunaan premium bagi semua kendaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini telah dimulai di Jakarta dan sekitarnya sejak tanggal 1 Juni 2012 dan di Jawa Bali sejak 1 Agustus 2012 berdasarkan Permen ESDM No. 1/2013. Pembatasan ini berlanjut pada tahun 2013 ini. Pemerintah memberlakukan pembatasan di Kalimantan dan Sumatera sejak 1 Februari 2013, dan di Sulawesi sejak 1 Juli 2013.

Pemerintah juga telah melarang penggunaan solar bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan di sektor perkebunan dan pertambangan sejak 1 September 2012. Kebijakan pembatasan penggunaan solar bersubsidi diberlakukan juga bagi kendaraan-kendaraan pemerintah di Jakarta dan sekitarnya sejak 1 Februari 2013, dan di Jawa dan Bali sejak 1 Maret 2013. Sejak 1 Maret 2013, pemerintah telah melarang penggunaan solar bersubsidi bagi kendaraan di sektor kehutanan dan perkebunan dengan pengecualian bagi perkebunan yang menguasai lahan di bawah 25 hektar, pertambangan berskala kecil dan kehutanan berskala kecil. Pemerintah juga melarang penggunaan solar bersubsidi bagi kapal-kapal perintis sejak 1 Februari 2013.

Pemerintah juga tetap melanjutkan program konversi dari minyak tanah ke gas berdasarkan Instruksi Presiden no. 64/2012. Program ini telah dijalankan sejak Mei 2007. Sejak Februari 2012, pemerintah meningkatkan penggunaan biosolar dari 5% menjadi 7,5% bagi sektor transportasi PSO (berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 32/2008).

## **V. Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Energi di Indonesia**

Dalam melaksanakan kebijakan di sektor energi, terutama menyangkut penghapusan subsidi BBM, Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan oleh karakteristik sektor energi itu sendiri, antara lain:

1. Akses masyarakat terhadap energi yang disediakan oleh pemerintah belum merata. Data dari Kementerian ESDM misalnya, menyebutkan bahwa tingkat elektrifikasi tahun 2012 baru mencapai 76,56% (Statistik Listrik 2012). Ketika belum semua lapisan masyarakat menikmati listrik, permintaan energi di masa yang akan datang cenderung meningkat.
2. Meskipun pertumbuhan tingkat elektrifikasi melebihi target (tahun 2012 diharapkan 75,3% wilayah Indonesia memiliki akses terhadap listrik), disparitas antar wilayah masih tinggi. Hal ini berpotensi makin menambah permintaan energi, yakni ketika hambatan-

hambatan di daerah-daerah dengan tingkat elektrifikasi rendah, teratasi. Hambatan-hambatan tersebut umumnya terkait dengan ketersediaan infrastruktur, terutama di daerah-daerah di luar Jawa.

3. Dampak dari dua karakteristik di atas adalah pertumbuhan permintaan energi yang cenderung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi. Ini terbukti pada data tahun 2012, dengan pertumbuhan ekonomi 6,2%, permintaan energi naik 8,4% dari tahun sebelumnya. Kecenderungan ini masih akan berlanjut karena kedua karakteristik yang disebut sebelumnya.
4. Sekitar 95% energi di Indonesia dihasilkan dari sumber energi fosil: 49,5% minyak, 20,4% gas dan 26% batubara (Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM 2012). Ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber energi fosil memiliki beberapa konsekuensi:
  - o Sebagai sumber energi tidak terbarukan, energi fosil akan habis. Data neraca energi dari Kementerian ESDM (2012) memperkirakan bahwa cadangan minyak bumi Indonesia akan habis pada tahun 2023, cadangan gas akan menyusul 22 tahun kemudian dan batubara 38 tahun setelah itu.
  - o Proses pemanfaatan sumber energi fosil (terutama minyak dan batubara) berdampak buruk pada lingkungan. Selain menyebabkan polusi udara, emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari pembakaran minyak dan batubara adalah penyebab perubahan iklim.
  - o Dari aspek ekonomi, ketergantungan pada minyak menimbulkan masalah tersendiri. Sejak tahun 2003 Indonesia merupakan negara importir migas secara netto. Indonesia adalah negara pengekspor sekaligus pengimpor migas. Ini terjadi karena jenis migas yang diekspor berbeda dari jenis yang diimpor, dan nilai ekspor migas Indonesia lebih kecil dibanding nilai impornya.
5. Selama ini Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia disubsidi oleh pemerintah dengan cara memberikan patokan harga jual di dalam negeri meskipun harga internasional berubah-ubah. Ketika harga migas di pasar internasional lebih tinggi daripada harga jual domestik, pemerintah harus melakukan subsidi. Masalah muncul karena subsidi dianggap sudah terlampau besar. Pada tahun 2012, kurang lebih 250 triliun Rupiah atau sekitar 17% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disisihkan untuk membiayai subsidi BBM.

Membandingkan kondisi saat ini dengan tujuan kebijakan, menunjukkan bahwa tantangan kebijakan energi saat ini adalah mencapai tujuan dan sasaran kebijakan-kebijakan energi yang sudah dituangkan dalam berbagai dokumen kebijakan. Dalam hal harga BBM, tantangan terberat adalah menghapus subsidi dalam komponen pembentuk harga BBM.

Secara singkat, sebagai sebuah kebijakan publik, penghapusan harga BBM di Indonesia tidak mudah dilaksanakan. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah biasanya berasal dari berbagai aspek, terutama politik.<sup>3</sup> Pencabutan subsidi BBM akan menaikkan harga BBM karena harga jual domestik saat ini di bawah harga minyak dunia. Ketika BBM merupakan barang kebutuhan pokok, kenaikan harga bukanlah hal yang populer, sehingga kemungkinan besar akan mendapat tentangan, bahkan dari lembaga-lembaga negara yang lain, seperti anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

---

<sup>3</sup>Lihat analisis IIF, *Indonesia: Energy Subsidies Raise Concerns*. March 12, 2013, hal. 5-6.

Aspek lain yang dapat menghambat kebijakan pencabutan subsidi BBM adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perlu sosialisasi kebijakan yang sangat intensif untuk meminimalkan hambatan ini. Di dalam sosialisasi perlu disampaikan tentang alasan, maksud dan tujuan penghapusan subsidi BBM secara transparan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Penolakan masyarakat di tahap awal penerapan kebijakan dapat diminimalkan dengan sosialisasi tersebut.

Faktor ekonomi dan finansial pemerintah adalah hambatan lain. Sosialisasi kebijakan pencabutan subsidi BBM akan mendapat dukungan masyarakat apabila pemerintah menyediakan alternatif-alternatif yang membuat ketergantungan masyarakat pada BBM menurun. Pembenahan sarana dan prasarana transportasi umum, pembangunan sumber energi berbasis non-BBM (terutama sumber energi baru dan terbarukan) mutlak dilakukan. Namun, pembangunan sarana dan prasarana tersebut memerlukan waktu dan dana tambahan. Ini merupakan tantangan tersendiri.

Sektor energi di Indonesia didominasi oleh sumber energi fosil (tak terbarukan) yang tidak berkelanjutan, dengan tingkat konsumsi lebih tinggi daripada produksi dengan kecenderungan kenaikan permintaan yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi, dan harga yang lebih rendah daripada harga internasional sehingga pemerintah harus melakukan subsidi. Karakteristik-karakteristik tersebut memiliki beberapa dampak negatif: beban pengeluaran pemerintah makin berat untuk mendanai subsidi BBM, konsumsi BBM dan batubara menimbulkan emisi penyebab polusi udara dan perubahan iklim.

## **VI. Kesimpulan**

Komitmen Indonesia untuk menghapus subsidi BBM dan meningkatkan efisiensi dalam konsumsi BBM telah lama diintegrasikan dalam rumusan kebijakan energi nasional. Penghapusan subsidi BBM diamanatkan oleh kebijakan energi di Indonesia sejak tahun 1998, ketika dalam KUBE 1998 disebutkan bahwa harga energi di Indonesia diarahkan untuk mencapai tingkat keekonomiannya. Hal tersebut tetap menjadi sasaran dalam kebijakan-kebijakan energi selanjutnya dan makin dipertajam dalam UU No. 30 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa subsidi energi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Peningkatan efisiensi energi di Indonesia sudah diamanatkan oleh kebijakan energi yang pertama pada tahun 1976. Penghapusan subsidi BBM dan peningkatan efisiensi energi semakin mendapatkan momentumnya ketika terjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) perubahan iklim dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia.

Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan subsidi BBM berasal dari beberapa aspek. Pertama, dukungan politik dari lembaga pemerintah lain (DPR) yang tidak sepenuhnya karena penghapusan subsidi BBM dianggap akan menambah beban ekonomi masyarakat. Kedua, tantangan pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang lebih transparan dan komunikatif. Ketiga, perlu persiapan penyediaan sarana dan prasarana alternatif yang akan membuat ketergantungan masyarakat terhadap BBM menurun.

Sekalipun penghapusan subsidi BBM belum sepenuhnya dilaksanakan, secara yuridis formal Indonesia telah memiliki kebijakan ke arah tersebut. Kesadaran untuk meningkatkan efisiensi energi juga sudah dilakukan bahkan sejak tahun 1976, ketika sumber daya energi fosil dianggap masih berlimpah. Tentu saja, masih diperlukan langkah-langkah lebih nyata dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan pemerintah dalam menghapus subsidi BBM bukan hanya akan meningkatkan potensi anggaran negara untuk mendanai pembangunan nasional, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Harga BBM non-subsidi juga akan menjadi insentif bagi pengembangan sumber energi alternatif (baru dan



terbarukan) yang lebih ramah lingkungan. Artinya, tujuan diversifikasi energi juga akan mendapatkan jalan lebih lapang ketika subsidi BBM dihapus.

### **Daftar Pustaka**

- Christopher Beaton dan Lucky Lontoh. (2010), *Lesson Learned from Indonesia's Attempts to Reform Fossil-Fuel Subsidies*, IISD, Oktober 2010.
- GSI dan IISD. (2012). *Indonesia's Fuel Subsidies: Action Plan for Reform*. March 2012.
- IIF. (2013). *Indonesia: Energy Subsidies Raise Concerns*, 12 Maret 2013.
- Kementerian ESDM (2012). *Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM 2012*.
- Kementerian ESDM (2012). *Statistik Listrik 2012*.
- OECD/IEA. (2013). *Tracking Clean Energy Progress 2013*. Paris, Perancis.

### **Sumber internet:**

- 1) <http://www.antaranews.com/en/news/88798/government-expects-budget-revision-discussion-to-finish-in-two-weeks>
- 2) "Ministry of Energy and Mineral Resource Decree No.1/2013",  
[http://www.esdm.go.id/regulasi/uu/cat\\_view/64-regulasi/70-peraturan-menteri/276-peraturan-menteri-esdm/378-tahun-2013.html](http://www.esdm.go.id/regulasi/uu/cat_view/64-regulasi/70-peraturan-menteri/276-peraturan-menteri-esdm/378-tahun-2013.html)
- 3) <http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/30/govt-use-it-limit-subsidized-fuel-sales.html>